

Strategi Pencegahan Potensi Konflik Sosial Dan Penegakkan Hukum Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Guna Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Nasional

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

arieffahmilubis0@gmail.com

Article History:

Received: 10 Desember 2024

Revised: 31 Desember 2024

Accepted: 03 Januari 2025

Keywords: *Konflik Sosial, Penegakkan hukum, Kawasan Ekonomi Khusus, Pembangunan Nasional.*

Abstract: *Pemerintah mengharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Dalam mengembangkan KEK ini, pemerintah menghadapi sejumlah kompleksitas yang membutuhkan penanganan yang cermat untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional yaitu konflik agraria yang muncul sebagai isu utama dalam proses pengembangan KEK. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus belum optimal, distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup masih lemah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu inisiatif strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai daerah dan peningkatan daya saing nasional serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi. Berkembangnya jumlah KEK di Indonesia sejalan dengan kebutuhan investasi yang tinggi. Hingga awal tahun 2024, terdapat 22 kawasan yang telah ditetapkan sebagai KEK, yakni terdiri dari 12 KEK Industri manufaktur, 2 KEK Digital, 2 KEK Jasa, 6 KEK Pariwisata dan 4 masih dalam proses penetapan seperti pada gambar 1.



GAMBAR 1 DISTRIBUSI 22 KEK DAN 4 DALAM TAHAP USULAN

Pemerintah mengharapkan KEK dapat meningkatkan realisasi investasi pada 2023 sebesar Rp61,9 triliun dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 78. 774 orang yang merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen investasi Rp214 triliun. KEK telah berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27. 526 orang atau 49 persen dari kumulatif tenaga kerja¹. Capaian kumulatif KEK bulan Juni 2024 Rp 205,2 Triliun dengan capain semester 1 Rp 31,4 triliun² (Lihat gambar 2).



GAMBAR 2 RINGKASAN CAPAIAN KINERJA KEK

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230112/9/1617696/airlangga-beberkan-sederet-hambatan-pengembangan-kek-apa-saja>

² Perkembangan KEK disampaikan Kepala Biro investasi, kerjasama, dan komunikasi Sekjen Dewan Nasional KEK, Rakor Wantannas tanggal 30 Juli 2024

Dalam mengembangkan KEK ini, pemerintah menghadapi sejumlah kompleksitas yang membutuhkan penanganan yang cermat untuk meminimalisir risiko **konflik sosial** yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional yaitu **konflik agraria** yang muncul sebagai isu utama dalam proses pengembangan KEK. KEK sering kali terletak di area yang sebelumnya dikelola dan dihuni oleh masyarakat lokal, dimana lahan tersebut bukan hanya sebidang tanah, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan komunitas tersebut.

Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang transparan dan adil untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan keadilan dan kehormatan yang sama. Selanjutnya adalah tantangan dalam **distribusi manfaat sosial ekonomi** dari KEK. Ketika KEK mulai beroperasi, seringkali muncul pertanyaan apakah semua pihak mendapatkan manfaat dari sosial ekonomi yang sepadan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Selanjutnya, pengawasan terhadap **keseimbangan lingkungan hidup** tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya alam digunakan dengan cara yang tidak merugikan lingkungan. Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan regulasi yang efektif agar KEK tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi masa depan.

Menghadapi ketiga tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan KEK yang adil dan lestari. Pendekatan ini harus mengintegrasikan kebijakan yang jelas, koordinasi yang efektif, dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun suatu Rekomendasi Kebijakan tentang **Strategi Pencegahan Potensi Konflik Sosial dan Penegakkan Hukum Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Rangka Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Nasional**.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan penyusunan penelitian melalui porses pengkajian *current issue* di Dewan Ketahanan Nasional di Jalan Merdeka Barat. Kegiatan ini diusulkan untuk mendapatkan strategi yang sesuai dengan tujuan dari diselenggarakannya pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut. Pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi khusus diharapkan bisa menggunakan dan menjalankan rekomendasi ini dalam menjalankan pembangunan. Sasaran kegiatan pada pada pengelola pembangunan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sebelum pelaksanaan kegiatan, responden diberikan materi awal berupa *Term of Reference* (TOR) ditujukan kepada narasumber dari pihak kementerian dan lembaga terkait termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Kemudian dilakukan rapat terbatas antar Kementerian Lembaga terkait termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi untuk pembahasan materi. Hal ini untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan sikap responden sebelum menerima materi yang diberikan oleh tim. Metode dilaksanakan dengan ceramah, tanya jawab dan foto bersama. Tim mahasiswa dan dosen

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. POKOK-POKOK PERMASALAHAN.

1. Pokok permasalahan 1 : Penyelesaian konflik agraria di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum optimal, dengan akar permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses manajemen proyek KEK untuk mengurangi konflik kepentingan
 - b. Belum memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak, sesuai dengan nilai yang telah ditentukan
 - c. Lemahnya leadership untuk membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan dengan pihak pihak terkait untuk dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial lebih awal untuk mencari solusi bersama
 - d. Masih ada pertentangan klaim (sengketa) atas kepemilikan tanah di wilayah KEK Tanjung Kelayang (seluas 30,22 hektar di atas HGB No. 00076 PT. Belitung Pantai Intan dengan Sdr. Fujianto Tanjono).
 - e. Belum ada prosedur baku pengendalian penanganan sengketa lahan berlatar belakang Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - f. Maraknya pialang tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis, baik strategis provinsi maupun nasional
2. Pokok permasalahan 2 : Distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal, dengan akar permasalahan sebagai berikut :
 - a. Tidak meratanya Akses dan Kesempatan dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat
 - b. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan, akses modal, dan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di KEK Batam
 - c. Tanpa pemberdayaan masyarakat yang optimal, pembangunan ekonomi di KEK cenderung tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
 - d. Investasi Pemerintah dalam menyiapkan SDM setempat di bidang pariwisata belum memadai.
 - e. Kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyiapan tenaga kerja pariwisata belum optimal.
 - f. Sektor kelautan dan pertambangan masih lebih diminati masyarakat setempat dibanding sektor pariwisata.
3. Pokok permasalahan 3: Pengawasan dan pengendalian terhadap keseimbangan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan masih lemah, dengan akar permasalahan sebagai berikut :
 - a. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kondisi sosial di wilayah KEK
 - b. Keterbatasan sumber daya pengamanan dan infrastruktur untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara efektif.
 - c. Lemahnya sistem regulasi dan penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian lingkungan dan dinamika kebutuhan sosial.

- d. Penambangan belum selaras dengan eksistensi Global yang direvalidasi secara berkala oleh *UNESCO*.
- e. Tata kelola dan tata niaga timah belum dapat memberikan jaminan praktik pertambangan rakyat yang patuh pada regulasi untuk komoditi tambang strategis.
- f. Masih cukup marak penambang timah ilegal yang umumnya abai terhadap praktik pertambangan timah berkelanjutan dan sesuai regulasi.



Gambar : Dalam kunjungannya ke Batam, tim Setjen Wantannas diterima Walikota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin yang didampingi BP Batam, Forkopimda terkait (Kejari Batam dan Polresta Barelang), OPD terkait (Disnaker, Disdik, Dinas LH Kota Batam), Perwakilan KEK Nongsa Digital Park dan Perwakilan KEK Batam Aero Teknik.

B. FAKTOR YANG MEMENGARUHI**1. Global dan Regional.**

- a. Fluktuasi harga pangan global yang mengancam stabilitas harga pangan Indonesia dan daya beli masyarakat.
- b. Penolakan Uni Eropa terhadap program transisi energi Indonesia berbasis Sawit.
- c. Meningkatnya pertarungan geopolitik terkait perebutan sumber daya alam, energi, pangan dan pasar global.
- d. Isu kritis perdagangan karbon global dimana harga *Carbon trade* di negara berkembang yang masih sangat rendah.
- e. Liquiditas global yang semakin ketat ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
- f. Target SDGs sampai akhir 2023 baru mencapai 15 % yang menghambat Transisi menuju pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
- g. *Global Disruption Technology* dan Otomatisasi
- h. *Economic Uncertainty* yang membuat *Vulnerability Economic*.
- i. Pemberlakuan EUDR 1 Januari 2025.
- j. *UNESCO Geopark* Global Belitung memberikan rasa bangga, memperkuat identitas dan bisa dijadikan magnet untuk menarik wisatawan manca negara.
- k. *Global Tourism Index* yang diukur dengan *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI). Indeks Indonesia naik ke peringkat 32 tahun 2021 dari peringkat 44 tahun 2019 dari 117 negara yang diukur. TTCI diukur oleh *World Economy Forum* setiap dua tahun. Indonesia menargetkan peringkat ke 29/117 pada tahun 2023³.
- l. *Asia Tourism Forum*. Indonesia menjadi tuan rumah *Asia Tourism Forum* (diselenggarakan setiap dua tahun) untuk ketiga kalinya, yaitu *10th Asia Tourism Forum* di Bandung (tahun 2012), *12th Asia Tourism Forum* di Bandung (tahun 2016), dan *14th Asia Tourism Forum* di Palembang, tanggal 6 Mei 2024.

2. Nasional

- a. Pengembangan ekonomi digital dan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
- b. Meningkatnya utang pemerintah dan BUMN untuk memperkuat kebijakan fiskal karena sumber pembiayaan keuangan negara bertumpu pada pajak.
- c. Produksi Migas Nasional berkurangnya yang menyebabkan impor Migas meningkat, sehingga memperbesar defisit neraca perdagangan sektor Migas.
- d. Ketahanan pangan nasional menurun seiring dengan terjadi cuaca ekstrim dan lemahnya hilirisasi produk pertanian serta alih fungsi lahan sehingga mengurangi

³ <https://www.antaranews.com/berita/4110933/ri-fokus-genjot-destinasi-super-prioritas-tingkatkan-indekspariwisata>

sustainable agricultural.

- e. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi baik secara individu maupun wilayah masih relatif tinggi meskipun telah diatur dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Gini Ratio.
- f. Deindustrialisasi Produk Manufaktur akibat perkembangan Iptek, Inovasi, dan produktivitas Ekonomi (Hilirisasi industri hulu dan pengembangan industri teknologi) masih sangat lam bat.
- g. Potensi EBT untuk menopang ketahanan energi nasional belum dimanfaatkan secara optimal.
- h. Subsidi energi termasuk listrik dan BBM yang membebani keuangan negara
- i. Belum kuatnya produktivitas dan tata kelola BUMN.
- j. Penyediaan fasilitas dan kemudahan tentang pertanahan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK sesuai PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Pertanahan menjadi salah satu dari enam fasilitas dan kemudahan yang diamanatkan PP tersebut, bidang lainnya yaitu 1) perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 2) lalu lintas barang; 3) ketenagakerjaan; 4) keimigrasian; dan 5) perizinan dan non perizinan.
- k. SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat selaku pejabat pembuat akta tanah dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah (Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- l. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044 sebagai acuan dalam pembahasan anggaran pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung, khususnya di KEK Tanjung Kelayang yang juga berstatus sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Meskipun Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin tidak lagi berstatus internasional, namun masih tetap dapat melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan tertentu, diantaranya kegiatan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan.

C. KONSEPSI

1. Kebijakan

Terwujudnya strategi pencegahan potensi konflik sosial dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui optimalisasi penyelesaian konflik agraria, optimalisasi distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal, dan penguatan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup guna stabilitas dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan nasional.

2. Strategi

- a. Mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria
- b. Mengoptimalkan distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal
- c. Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

3. Upaya**a. Upaya Strategi 1 : Mengoptimalkan penyelesaian konflik agraria**

- 1) mengoptimalkan pelibatan masyarakat lokal dalam proses manajemen proyek KEK untuk mengurangi konflik kepentingan;
- 2) memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang terdampak, termasuk relokasi jika diperlukan, sesuai dengan nilai pasar dan kebutuhan masyarakat yang terdampak;
- 3) memperkuat keberlanjutan Pejabat Wali Kota sebagai leader untuk membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah Kota Batam dan pengelola KEK serta pihak terkait lainnya untuk dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial lebih awal dan mencari solusi bersama;
- 4) melakukan penelaahan secara seksama atas keabsahan SKT yang dijadikan alat bukti dan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan pertanahan yang berlaku serta mewajibkan pendaftaran setiap bidang tanah yang memiliki alat bukti awal SKT di kantor pertanahan setempat untuk proses sertifikasi hak atas tanah yang lebih otentik dan berkepastian hukum;
- 5) memperbaiki administrasi pertanahan di tingkat desa/kelurahan menuju digitalisasi data pertanahan, dan segera menetapkan prosedur baku pengendalian penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, sekurangnya berupa Peraturan Bupati; dan
- 6) menggalakan sarasehan diantara APH dalam upaya peningkatan pemahaman hukum agraria dan meningkatkan sosialisasi hukum agraria untuk menekan kegiatan pialang tanah yang sering merugikan masyarakat.

b. Upaya Strategi 2 : Mengoptimalkan distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal

- 1) mendorong pemerataan akses dan kesempatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat melalui kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam peningkatan kompetensi SDM lokal (tersertifikasi) di bidang pariwisata;
- 2) mendorong pemberdayaan pekerja local dengan inklusivitas informasi rekrutmen yang transparan dan akuntabel dalam mengelola KEK serta menginisiasi sistem informasi pasar kerja dan memperkuat serta mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK);

- 3) merespon partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program di KEK;
 - 4) segera menerbitkan kebijakan afirmatif untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM lokal di bidang pariwisata serta menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan DUDI di KEK dengan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan;
 - 5) meningkatkan investasi untuk memperoleh kualitas dan kapasitas tenaga kerja terampil dan kompeten melalui peningkatan fasilitas sekolah vokasi dan politeknik pariwisata sesuai kebutuhan tenaga kerja di KEK Tanjung Kelayang; dan
 - 6) meningkatkan sosialisasi peran pariwisata bagi perekonomian masyarakat sehingga transisi pertambangan timah ke pariwisata dilandasi kesadaran pribadi.
- c. **Upaya Strategi 3** : Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- 1) memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kondisi sosial di wilayah KEK serta menertibkan jaringan aktor yang mendukung penambangan ilegal;
 - 2) memperkuat sumber daya pengamanan dan infrastruktur untuk pengawasan dan pengendalian secara efektif serta menjamin aksesibilitas dan konektivitas yang seimbang dengan investasi guna mempertahankan *Geoparks* yang direvalidasi *UNESCO* empat tahun sekali;
 - 3) memperkuat sistem regulasi dan penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian lingkungan dan dinamika sosial dengan memperketat regulasi tata kelola dan tata niaga pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial;
 - 4) menyelaraskan penataan kawasan di wilayah KEK dengan kawasan di sekitarnya;
 - 5) mendorong penerapan teknologi penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 6) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil tambang, terutama dalam pengelolaan lingkungan.

KESIMPULAN

KEK telah berjalan dengan capaian investasi sebesar Rp30,9 triliun atau 27 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja baru sebesar 27. 526 orang atau 49 persen dari kumulatif tenaga kerja. Capaian komulatif KEK bulan Juni 2024 Rp 205,2 Triliun dengan capain semester 1 Rp 31,4 triliun Perkembangan positif KEK yang masuk pada kategori “optimal” berdasarkan Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2024 yang dirilis oleh Sekretariat Jenderal Dewan KEK, disisi lain ternyata masih ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pengembangannya yang belum dapat diselesaikan secara tuntas sampai saat ini. Beberapa pokok permasalahan yang dihadapi yaitu Penyelesaian konflik agraria

di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus belum optimal, distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup masih lemah, sebagai berikut :

- a. Permasalahan Penyelesaian konflik agraria di wilayah KEK belum optimal, yang cenderung adanya sentralisasi keputusan dan kontrol ekonomi dalam tangan pihak-pihak tertentu di KEK, tanpa melibatkan masyarakat secara luas dalam proses tersebut. Kurangnya program pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan keterampilan, akses modal, dan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di KEK Batam. Tanpa pemberdayaan masyarakat yang optimal, pembangunan ekonomi di KEK cenderung tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Prioritas pendidikan vokasi pariwisata masih terkendala dengan keterbatasan keuangan negara dan daerah, sementara lembaga pendidikan yang ada jumlahnya masih minim. Pemerintah dan Pemda masih diperlukan untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Keberhasilan transformasi dan transisi kultural menuju sektor pariwisata bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi ketidakadilan Sosial dalam pemberian manfaat ekonomi yang dapat memperburuk ekonomi dan meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat dan potensi terjadinya ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat lokal akibat ketimpangan ekonomi dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Disisi lain kualitas SDM lokal di bidang pariwisata tidak dapat memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dalam pembangunan KEK.
- b. Permasalahan distribusi pemanfaatan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat lokal belum optimal yang cenderung adanya sentralisasi keputusan dan kontrol ekonomi dalam tangan pihak-pihak tertentu di KEK, tanpa melibatkan masyarakat secara luas dalam proses tersebut. Tanpa pemberdayaan masyarakat yang optimal, pembangunan ekonomi di KEK cenderung tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Disisi lain prioritas pendidikan vokasi pariwisata masih terkendala dengan keterbatasan keuangan negara dan daerah, sementara lembaga pendidikan yang ada jumlahnya masih minim yang diperlukan kehadiran pemerintah dan Pemda untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini akan berimplikasi ketidakadilan Sosial dalam pemberian manfaat ekonomi yang dapat memperburuk ekonomi dan meningkatkan kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat serta terjadinya ketimpangan ekonomi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Disisi lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan karena tidak memperhitungkan keseimbangan kebutuhan dan potensi lokal. Disamping itu kualitas SDM lokal di bidang pariwisata tidak dapat memenuhi standar kompetensi yang diperlukan dan pengembangan SDM lokal tidak *link and match* dengan keperluan kompetensi pembangunan KEK.
- c. Permasalahan Pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup masih lemah dan cenderung Meningkatnya degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia tanpa pengawasan yang memadai. Peningkatan potensi konflik sosial akibat ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat serta menurunnya kualitas hidup akibat dampak negatif lingkungan dan kondisi sosial yang tidak terkontrol. Revalidasi status *Geopark* Belitong harus menjadi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan diserahkan kepada Badan Pengelola Belitong *UNESCO Global Geopark* semata. Kualitas tata kelola dan tata

niaga timah sering berseberangan dengan orientasi keberlanjutan dan dinilai sebagai penghambat proses produksi. Hal ini akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan kesehatan manusia. Peningkatan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat serta penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Potensi terjadinya kerugian ekonomi akibat dampak lingkungan dan ketidakstabilan sosial. Disisi Lain nilai manfaat yang dirasakan masyarakat minim namun dampak kerusakan lingkungan jauh lebih besar dari nilai manfaat.

DAFTAR REFERENSI

- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230112/9/1617696/airlangga-beberkan-sederet-hambatan-pengembangan-kek-apa-saja>
- Perkembangan KEK disampaikan Kepala Biro investasi, kerjasama, dan komunikasi Sekjen Dewan Nasional KEK, Rakor Wantannas tanggal 30 Juli 2024
- Diskusi dengan masyarakat adat FKUB Batam tanggal 24 April 2024
- <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-kek-batam-aero-technic-dan-kek-nongsa-digital-park/> diunduh 21 April 2024
- Paparan Sekda Kota Batam tanggal 24 April 2024 KKDN Wantannas
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169057/pp-no-68-tahun-2021> diunduh 21 April 2024
- Hasil Kunjungan Tim Wantannas ke BAT tanggal 24 April 2024
- Yosep Surya Ditama Sibarani dan Maarthen Youseph tampanguma, Susan Lawotjo, “Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti Awal Hak Milik Atas Tanah”, Lex Privatum Vol. XI/No. 4/Mei/2023
- Tarapeda SH, mantan Kepala Desa Tanjung Binga, disampaikan pada tgl 15 Mei 2024, di Polres Belitung
- <http://bit.ly/AppsBisniscomPS>(<http://bit.ly/AppsBisniscomIOS>)
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231207/257/1721746/opini-kawasan-ekonomi-khusus-dan-kesenjangan-sosial-di-indonesia>
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044, Pasal 11
- <https://belitung.tribunnews.com/2023/07/30/dana-pengembangan-pariwisata-rp238-m-disparbudpora-babel-ajak-pemerintah-daerah-kejar-dana-pusat>
- <https://tirto.id/kek-tanjung-kelayang-akui-sulit-dapat-tenaga-kerja-lokal-pariwisata-gs59>
- <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/20/urgensi-pendidikan-pariwisata-sebagai-eskalasi-ekosistem-kepariwisataan-di-bangka-belitung>
- Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), “Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang”, Desember 2023
- [file:///C:/Users/hp/Downloads/TI NJAUAN_LI NG KU NGAN_HI DU P_2023_2. pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/TI%20NJAUAN_LI%20NG%20KU%20NGAN_HI%20DU%20P_2023_2.pdf)
- Kepmen ESDM Nomor: 69. K/MB. 01/MEM. B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang

Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis.

<https://bangka.tribunnews.com/2024/05/12/transformasi-tata-kelola-ekonomi-dan-sosial-solusi-perlambatanekonomi-babel?>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402183414-4-527632/dirut-pt-timah-produksi-timah-ri-terbesarke-2-dunia>, diunduh tgl 18 Mei 2024

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240424/44/1759688/marak-penambang-ilegal-perhapi-tata-kelolapertambangan-timah-perlu-dievaluasi>

Muhammad Ego Saputra, “Illegal Access dalam Aktivitas Tambang Inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka”, Jurnal Studi Inovasi Vol. 4 No. 3 (2024): hal 1-10.

<https://www.antaranews.com/berita/4110933/ri-fokus-genjot-destinasi-super-prioritas-tingkatkan-indekspariwisata>